

Peran Bidang Program Dinas PUPR Dalam Pembangunan Jalan Di Kabupaten Aceh Barat

Mita Febrianika¹, Inseun Yuri Salena², Dewi Purnama Sari³
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar
Aceh Barat, 23617, Indonesia

Email : mitafebi912@gmail.com¹, inseunsalena@utu.ac.id², dewipurnamasari@utu.ac.id

Abstrak

Pembangunan jalan di Kabupaten Aceh Barat memerlukan peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan jalan yang akan dilakukan dalam daerah, melalui Bidang Program Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana peran Bidang Program Dinas PUPR dalam perencanaan pembangunan jalan di lingkup Kabupaten Aceh Barat. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggambarkan obyek yang di teliti berupa hasil wawancara pihak terkait di lapangan. Dari hasil penelitian ini di dapatkan bahwa Bidang Program Dinas PUPR telah melaksanakan perannya dalam pembangunan jalan di lingkup Kabupaten Aceh Barat. Melalui beberapa tahapan yaitu mendapatkan usulan dari masyarakat, diteruskan ke instansi-instansi terkait meliputi Kepala Desa, Camat, dan Bupati, lalu ke Dinas PUPR yang akan di bahas langsung pada MUSRENBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan). Melalui evaluasi dan seleksi hasil Musrenbang sehingga diperoleh bahwasananya dalam kemajuan suatu wilayah pembangunan Infrastruktur sangat perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah, karena hal ini sangat penting untuk meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan dasar dan untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing, pembangunan infrastruktur juga berpotensi memberikan kontribusi pada pemulihan ekonomi yang lebih kuat serta sangat penting untuk mengatasi perubahan iklim terlebih utama yaitu jalan, jalan merupakan akses utama yang harus dilaksanakan oleh sebab itu jalan menjadi prioritas dalam program perencanaan pekerjaan.

Kata kunci : Dinas PUPR, Musrenbang, Jalan, Program

1. Pendahuluan

Dalam pembangunan daerah diperlukan suatu cara yang tepat dan sesuai dari aspek pendanaan dan cara yang efektif dari aspek hasil. Dalam melakukan perencanaan pembangunan pemilihan cara yang tepat menjadi begitu penting agar mampu mengetahui bagaimana peran pemerintah dan masyarakat, sehingga keduanya bisa bekerja secara sinergis dan optimal[1].

Perencanaan pembangunan suatu daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang mana mengacu pada sistem *bottom up*, yaitu perencanaan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat dengan berbagai permasalahan yang di hadapi dalam mengambil suatu putusan dan pemerintah sebagai fasilitator pelaksanaanya.

Dinas PUPR merupakan suatu perangkat daerah yang di berikan tugas dan wewenang serta tanggung jawab untuk menjalankan tugas daerah dalam lingkup pekerjaan umum dan penataan ruang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(DPUPR) Aceh Barat melalui bidang program adalah salah satu susunan organisasi DPUPR yang membawahi seksi penyusunan program dan pengawasan, seksi data, evaluasi dan pelaporan, dan seksi pengujian mutu. Bidang program memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan sebagai suatu pihak yang menjadi pelaksana dan pengontrol pekerjaan pembangunan jalan di wilayah nya.

Seiring dengan kemajuan zaman yang menuntut pemerintah dalam perkembangan peran dan fungsi pemerintah, untuk itu perlu dilakukakannya pemaksimalan peran serta fungsi tersebut, pemerintah perlu melakukan pembentukan susunan organisasi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan bagian nya masing-masing[2].

Kerangka Dasar Teori

Perencanaan ialah suatu kegiatan mempersiapkan melalui perumusan dan penetapan suatu keputusan tentang tahapan menyelesaikan suatu permasalahan dalam pekerjaan secara teratur untuk mencapai suatu tujuan.

Pembangunan ialah salah satu usaha dalam menumbuhkan dan memberikan perubahan yang telah terencana. Pembangunan memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan merupakan suatu proses mengembangkan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang sehingga di perlukan suatu perencanaan yang tepat dan akurat[3].

Jalan ialah suatu sarana transportasi yang memiliki fungsi sebagai penggerak pembangunan suatu daerah, dan dapat dipengaruhi dan mempengaruhi beberapa sektor berupa perdagangan, kawasan industri pemukiman dan pemerintahan.

Maka dari itu dalam urusan pembangunan jalan Bidang Program memiliki peran penting di dalam suatu perencanaan pembangunan jalan pada suatu daerah. Dengan adanya pembangunan jalan di dalam suatu daerah atau desa maka akan menjamin peningkatan perekonomian dan pendidikan yang lebih baik lagi bagi masyarakatnya.

Dengan memperhatikan visi dan misi RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) maka di tetapkan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut : **“Terciptanya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal Dalam Mendukung Aceh Brat yang Makmur Sehat dan Berwawasan Lingkungan dengan Memperhatikan Dampak Risiko Berencana”**. Berdasarkan visi tersebut menjelaskan tentang perlunya infrastruktur yang artinya melakukan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana yang berupa jembatan dan jalan, sanitasi lingkungan, air bersih, drainase, sarana pemerintah dan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan dan ekonimi sosial. Dan adapun misi dari DPUPR Kabupaten Aceh Barat yaitu :

- 1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur kawasan strategis. Daerah tertinggal dan perbatasan serta penanganan kawasan rawan bencana guna mengurangi kesenjangan antar wilayah.
- 2) Mewujudkan jaringan jalan kabupaten yang berkelanjutan dengan mobilitas aksesibilitas dan keselamatan yang andal untuk melayani pusat-pusat kegiatan wilayah dan kawasan strategi daerah.
- 3) Mengintegrasikan pembangunan konstruksi pekerjaan umum yang infrastruktur pekerjaan umum yang berdasar pada penataan ruang dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan saran dan prasarana sumber daya air secara efisien, handal, berkualitas, aman dan berwawasan lingkungan.

- 5) Mewujudkan kelancaran tata laksana administrasi perkantorn dan pengembangan sumber daya aparatur serta peningkatan kualitas sumber daya jasa konstruksi[4].

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi obyek penelitian ialah manusia yaitu sebagai pelaku dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Metode kualitatif ialah metode yang berusaha menafsirkan obyek penelitian berdasarkan situasi yang terjadi di lapangan.

2.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan pada Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat, yang terletak di jalan sisingamangaraja lorong BKKBN kota meulaboh dan yang menjadi fokus penelitian yaitu pada Bidang Program yang memiliki tugas dan peran dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dan perencanaan pembiayaan pembangunan.

2.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan tahapan yang di lakukan oleh Bidang Program di Dinas PUPR dalam Pembangunan Jalan di Kabupaten Aceh Barat, sehingga menjadi bahan evaluasi dan kontrol kegiatan guna meminimalisir ketidakpastian serta pemborosan biaya.

2.4 Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini tahapan yang digunakan berupa kegiatan wawancara dan melakukan analisis dokumen (catatan maupun arsip) berikut tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Wawancara
Wawancara yaitu bertemunya dua orang atau lebih sebagai narasumber yang memberikan informasi terkait fokus penelitian guna mengetahui sejauh mana peran bidang program dalam merencanakan pembangunan suatu wilayah. Adapun narasumber yang menjadi objek yang di wawancarai berjumlah 10 orang yang terdiri dari kepala bidang program, para KASI serta beberapa staf lapangan
- b. Analisis dokumen, dalam penelitian ini dokumen dipakai sebagai media untuk menggali informasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang terdiri dari hasil survey, dan data sekunder yang terdiri dari laporan hasil kegiatan musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten.

3. Hasil dan Pembahasan

Tahapan awal dari perencanaan pembangunan yang terdiri dari pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan drainase di mulai dari desa, kelurahan, dan di sepakatilah usulan-usulan pembangunan pada MUSRENBANG tingkat desa, hasil dari MUSRENBANG tingkat desa lalu di usulkan ke MUSRENBANG tingkat Kecamatan dan hasil dari MUSRENBANG tingkat Kecamatan inilah yang akan menjadi usulan pembangunan tingkat Kabupaten. Musrenbang Kabupaten memiliki tujuan untuk melakukan

sinkronisasi dari hasil usulan masyarakat melalui musrenbang Kecamatan dengan penentuan skala prioritas dari setiap kegiatan.

Dari hasil MUSRENBANG Kabupaten kemudian diajukan ke BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan hasil keputusan tersebut di sampaikan kepada panitia anggaran, yang terdiri dari (a) Sekretaris Daerah, (b) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, (c) Penyusun Program yaitu Dinas PUPR. Hasil dari keputusan tersebut kemudian di pilih program yang menjadi prioritas untuk di ajukan oleh sekretaris daerah kepada DPR guna mendapatkan penetapan dan pengesahan sebuah anggaran oleh DPRD[2].

Strategi Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat dalam pembangunan *Ring Road* jalan hitam (Aspal) mulai dari dalam kota sampai ke pendesaan menjadi prioritas pemerintah melalui kegiatan MUSRENBANG yang di dukung oleh Dinas terkait seperti Dinas PUPR Aceh Barat, program ini juga merupakan suatu pelayanan umum yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat karena jalan merupakan akses utama dalam masyarakat beraktivitas sehari-hari[5].

Penyusunan rencana strategi kegiatan melalui Dinas PUPR, merupakan rincian kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Dinas PUPR Aceh Barat berfungsi untuk membantu Pemprov maupun Pemda pada bidang penyediaan dan pemeliharaan sarana maupun prasarana bidang PUPR. Sarana dan prasarana tersebut dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dalam meningkatkan aktivitas sehari-harinya, maupun dalam penyebaran pembangunan dalam meningkatkan taraf hidup nyaman dan kesejaheraannya.

Dalam perencanaan pembangunan jalan, masyarakat juga dilibatkan dalam pemberian usulan-usulan ataupun ide dalam rapat MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat juga terlibat dalam rangka untuk menerima usulan-usulan yang diberikan oleh RT, Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten lalu hasil dari musyawarah tersebut disusun menjadi sebuah perencanaan pembangunan yang akan di kerjakan. Lalu dari rencana tersebut Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat mengajukan kepada badan perencanaan pembangunan daerah. badan perencanaan pembangunan daerah juga terlibat dalam membahas perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan, pembahasan tersebut melibatkan sekretaris daerah. Setelah pembahasan selesai di bahas dan di dapatkan sebuah kesepakatan maka langkah selanjutnya berupa penyerahan perencanaan pembangunan kepada pemerintah untuk mendapatkan penetapan dan pengesahan anggaran. Dari hasil penelitian dan hasil wawancara di dapatkan bahwa cukup banyak desa yang berada di Kabupaten Aceh Barat mengusulkan permasalahan yang terdapat dalam desa. Meskipun demikian prioritas kegiatan yang diusulkan oleh masing-masing desa berbeda. Dan lebih dari itu dapat diketahui juga bahwasanya berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat lebih men terdapatitik beratkan pada hal-hal yang bersifat *urgent* yaitu menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari.

Suatu pembangunan yang akan di laksanakan harus melalui tahapan yang telah di lebih dulu agar bisa di ketahui berapa lama waktu yang akan di perlukan dalam menyelesaikan pembangunan jalan tersebut, dan semua aktivitas yang berada di dalamnya termasuk proses perencanaan pembangunan. Para perencana berusaha menemukan teknik yang bisa meningkatkan kualitas perencanaan dalam menghadapi berbagai aktivitas pembangunan yang kian meningkat, di antaranya dengan membuat agenda yang tepat.

Berkaitan dengan perencanaan pembangunan jalan diawali dengan menyusun rencana anggaran biaya yang berarti bahwa DPUPR melalui bidang program melakukan

perencanaan dalam membiayai pembangunan jalan yang bersumber dari anggaran APBN yang merupakan rencana anggaran pemerintah per tahunnya yang di diskusikan dan di sah kan oleh pemerintah daerah itu sendiri serta ditetapkan dalam peraturan No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4578), Selanjutnya penyediaan fasilitas pelengkap oleh Dinas PUPR, dan dukungan dari pemerintah berupa pencairan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan. Pihak yang berkaitan dalam aktivitas merencanakan biaya pembangunan jalan tersebut ialah : Pemerintah, DPUPR, jawatan (khusus bangunan negara), Konsultan, Kontraktor, dan instansi lainnya.

4. Kesimpulan

Kegiatan perencanaan program pembangunan jalan meliputi kegiatan perencanaan dan pembiayaan bangunan jalan yang di lakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat melalui MUSRENBANG dengan berbagai instansi yang terlibat seperti sekretaris daerah, DPR, DPRD, BAPPEDA dan lainnya. Setelah tahap-tahap tersebut di lakukan dan di setuju oleh pihak penyelenggara, maka perencanaan yang di rencanakan akan segera dimulai. Selanjutnya melakukan rencana anggaran pembangunan jalan yang disusun dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) di antaranya dari anggaran APBN, APBD, DTU, bantuan dari pusat dan dari perusahaan swasta, Dinas PUPR Kontraktor, serta instansi lainnya. Penyelenggaraan pembangunan jalan dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan jalan oleh Dinas PUPR berupa pekerjaan perbaikan jalan dengan kegiatan serak kerikil serta meningkatkan jalan melalui pekerjssn pelebaran jalan. Kemudian hambatan yang dilalui Dinas PUPR dalam menjalankan perannya yaitu pencairan anggaran yang terhambat serta adanya faktor cuaca.

Daftar Pustaka

- [1] C. Hermawan, B. Laporan, S. Informasi, dan P. Daerah, “Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Pengendalian Banjir Di Kelurahan Sidodadi Kecamatan,” *eJournal Ilmu Pemerintah*, vol. 7, no. 1, hal. 465–478, 2019.
- [2] N. E. Purnama, E. Resmawan, dan Budiman, “Peran dinas pekerjaan umum dalam pembangunan jalan di Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur,” *Ilmu Pemerintah.*, vol. 6 (1), no. 1, hal. 487–500, 2018.
- [3] M. Ashari, “Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus Perencanaan Partisipatif Tahun 2009-2013) (An Analysis Of Regional Development Planning In North Lombok Regency : A Case Study Of Participatory Planning From 2009-2013),” *J. Ekon. dan Kebijakan. Publik*, vol. 6, no. 6, hal. 163–180, 2015.
- [4] DPUPR, *Rencana Strategis Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat*. 2021.
- [5] Makmur, *Teori Manajemen Stratejik dalam Pemerintahan dan Pembangunan*. Bandung: Refika Aditama, 2009.